

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi dapat menyebabkan terjadinya lahan kritis. Lahan kritis merupakan lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan, sehingga dapat menyebabkan kehilangan atau berkurang fungsinya (Departemen Kehutanan, 2009). Lahan dapat dikatakan berkurang fungsinya ketika lahan tersebut sudah tidak dapat mempertahankan tingkat produktivitasnya serta tidak dapat berfungsi sebagai media pengatur tata air yang baik (Departemen Kehutanan, 2009). Luas lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah mencapai 634,601 Ha (Peraturan Gubernur Jawa Tengah, 2011). Luasnya lahan kritis menjadi ancaman bagi kawasan hutan dan diluar kawasan hutan. Kekritisan lahan tersebut dapat memicu terjadinya bencana seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan di Provinsi Jawa Tengah. Pencegahan akibat ancaman bahaya perlu dilakukan dengan upaya mengurangi luasan lahan kritis. Sebagai upaya penurunan lahan kritis, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam dokumen RPJMD tahun 2013-2018 menargetkan bahwa penurunan lahan kritis sebesar 30% dari total lahan kritis yang ada di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2018. Penanganan lahan kritis menjadi prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada periode 2013-2018 yang dilaksanakan melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang kemudian disingkat menjadi RHL merupakan program pemerintah provinsi yang diarahkan untuk dapat mengurangi 30% luas lahan kritis dari total lahan kritis seluas 634,601 Ha yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2018. Jumlah 30% lahan kritis dari total luas lahan kritis yaitu sebesar 190,380.3 Ha. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan akhir tahun 2016, rehabilitasi telah dilaksanakan pada lahan seluas 19,813 Ha sedangkan pada tahun 2017, kegiatan rehabilitasi ditargetkan pada lahan seluas 24,766 Ha.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagai upaya pengurangan lahan kritis memiliki kendala, yaitu deforestasi yang terus terjadi dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan menurunnya luas tutupan lahan. Luas tutupan lahan hutan dari 1,118,000 Ha (2011) menjadi 1,033,800 Ha (2015) (Statistik Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2016). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun, luas tutupan lahan hutan di Jawa Tengah mengalami penurunan yaitu sebesar 84,200 Ha atau menurun 2.5% per tahun. Angka tersebut juga dapat dikatakan tinggi dan tindakan untuk menekan terjadinya deforestasi perlu segera dilakukan.

Deforestasi yaitu proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayunya atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Deforestasi dapat disebabkan oleh kebakaran hutan baik yang disengaja atau terjadi secara alami, konversi lahan pertanian, *illegal logging* dan penebangan kayu sebagai penggunaan kayu bakar. Deforestasi mengancam kehidupan umat manusia dan spesies mahluk hidup lainnya (Risnandar, 2017). Menurut analisis data spasial persebaran luasan lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa kabupaten dengan tingkat kekritisannya lahan paling luas yaitu Kabupaten Wonosobo, Temanggung, dan Pati. Dari ketiga kabupaten tersebut, Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten yang memiliki luasan lahan kritis tinggi. Mengingat Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten dengan letak hutan yang strategis di Pulau Jawa, terutama bagi Provinsi Jawa Tengah bagian selatan. Kabupaten Wonosobo sebagai hulu dari 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) besar yaitu Serayu, Luk Ulo dan Bogowonto yang mengalir setidaknya enam kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Enam kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Purworejo (Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, 2012). Kabupaten Wonosobo memiliki luasan lahan kritis sebesar 328 km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam kondisi kritis sebesar 70 km<sup>2</sup> dan agak kritis sebesar 258 km<sup>2</sup> dari total luas wilayah Kabupaten Wonosobo sebesar 981,41 Km<sup>2</sup>. Sedangkan lahan dengan kondisi potensial kritis sebesar 607 km<sup>2</sup> dan kondisi lahan tidak kritis yaitu sebesar 46 km<sup>2</sup>. Besarnya jumlah luasan lahan kritis di Kabupaten Wonosobo menyebabkan pentingnya program Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk mengurangi luasan lahan kritis yang ada saat ini.

Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan wilayah konservasi di luar kawasan hutan untuk meningkatkan nilai serta peluang pemanfaatan kawasan hutan demi kesejahteraan masyarakat. Melalui program RHL, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan yang sifatnya merehabilitasi hutan maupun lahan yang sudah termasuk kedalam kategori kritis sehingga dapat meningkatkan produktivitas hutan maupun lahan kembali. Kegiatan RHL ini merupakan program skala prioritas nasional yang dilaksanakan sampai dengan tingkat kabupaten/ kota hal ini menjadi penting untuk melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan RHL. Hasil evaluasi program RHL skala nasional yang dilaksanakan pada tahun 2003 atau yang disebut dengan GN-RHL menurut Subadi, (2010) merupakan program yang tidak berkelanjutan dan juga hanya berorientasi proyek saja. Kegagalan dari tidak adanya sistem pemantauan setelah dilakukan kegiatan penanaman sehingga tidak adanya laporan hasil pemantauan pada suatu keberjalanan program. Program hanya berorientasi pada kegiatan yang dikaitkan dengan politik maupun hanya untuk publikasi semata, sehingga kurang tercapainya tujuan yang sebenarnya pada program RHL. Pemantauan dan evaluasi merupakan suatu hal yang penting dalam keberlangsungan suatu program untuk melihat kesesuaiannya dalam mencapai tujuan dan juga sebagai tolak ukur keberhasilan suatu program.

Berdasarkan studi terdahulu mengenai evaluasi pada program GN-RHL, diperlukan pemantauan dan evaluasi pada program RHL agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi sangat penting dilakukan mengingat program RHL telah dilaksanakan kurang lebih selama empat dekade. Tata kelola pemantauan dan evaluasi program dapat mendukung ketercapaian pada suatu sistem tata kelola yang baik. Perencanaan, pemantauan dan evaluasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk memahami sistem yang berkelanjutan. Perencanaan harus tetap memperhitungkan kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan hingga memiliki hasil yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam perencanaan yang akan datang, sehingga perlu adanya sistem pemantauan dan evaluasi (Anderson, 1995).

Maka, perlu dilakukan analisis tata kelola pemerintahan untuk melihat tingkat keberhasilan RHL khususnya di Kabupaten Wonosobo dengan pendekatan *Governance System Analyst (GSA)* atau yang kemudian disebut dengan Analisis Sistem Pemerintahan (ASK). ASK memiliki kontekstualisasi dalam sistem dimana ruang lingkup sistem yang dianalisis memiliki dampak secara global atau pada skala yang lebih luas dari tema tata kelola, domain, sub-domain, dan skala pemerintahan. ASK menganalisis secara kompleks dengan multi domain dan multi level. Multi domain merupakan program yang melibatkan instansi/ *stakeholder* lain dalam menjalankan programnya. Multi level yaitu memiliki penerapan skala analisis global dari skala nasional hingga lokal. Sistem tata kelola pemerintahan memperhatikan lima struktur dan fungsi yang telah dituliskan dalam literatur ASK. Penelitian ini hanya menggunakan satu struktur dan fungsi yaitu pemantauan dan evaluasi yang dianggap telah dapat menjelaskan bagian penerapan strategi dan implementasi serta dapat menjadi masukan dalam penetapan visi dan analisis yang dilakukan dalam program. Selain itu, dalam penerapan struktur dan fungsi didasari oleh adanya penerapan kriteria evaluasi yang dilakukan untuk mengukur komponen struktur dan fungsi agar dapat digunakan dalam pertimbangan analisis. Pemantauan dan evaluasi merupakan sistem yang dapat mempengaruhi tata kelola. Pemantauan dan evaluasi penting dilakukan untuk penanganan program dalam mencapai tujuan dan keberlanjutan program. Program akan dinilai baik dan berlanjut apabila sistem pemantauan dan evaluasinya dapat digunakan sebagai masukan dalam perencanaan dan pengimplementasian program di masa yang akan datang.

## 1.2. Rumusan Masalah

Studi ini mengacu pada target penurunan lahan kritis yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 30%. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten dengan luasan lahan kritis yang tinggi, yaitu sebesar 328 km<sup>2</sup> yang terbagi kedalam tingkat kekritisian lahan kritis sebesar 70 km<sup>2</sup>, agak kritis sebesar 258 km<sup>2</sup>. Maka dari itu, Kabupaten Wonosobo memiliki peran bagi Provinsi Jawa Tengah dalam penurunan lahan kritis di

Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka pencapaian target penurunan lahan kritis tersebut, dapat dilakukan dengan cara Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), reboisasi dan penghijauan kembali bagi kawasan hutan maupun kawasan non hutan. Selain itu, dapat juga dilakukan melalui pendekatan Analisis Sistem Kepemerintahan yang selanjutnya disingkat (ASK) terhadap pelaksanaan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kabupaten Wonosobo sehingga dapat mengetahui sistem pemantauan dan evaluasi program RHL dari tahun ke tahun. Tidak menutup kemungkinan, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten/ kota dalam rangka penurunan lahan kritis memiliki beberapa kendala dan juga konsekuensi yang harus dihadapi.

Beberapa aspek seperti status kepemilikan lahan dapat menjadi kendala dalam kegiatan RHL. Status kepemilikan lahan milik swasta/ masyarakat bukan lahan milik negara juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk melakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), reboisasi maupun penghijauan. Ketika lahan bukan milik pemerintah, maka pemerintah tidak dapat memberikan intervensi lebih terhadap pemilik lahan, sehingga perlu menggunakan pendekatan secara personal. Selain status kepemilikan lahan, aspek finansial juga dapat menjadi kendala dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Pelaksanaan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dibutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah dalam menyelesaikan program pengurangan lahan kritis. Tingginya laju deforestasi yang tidak diimbangi dengan RHL juga dapat menjadi tantangan dikarenakan masih banyak masyarakat yang melakukan praktek illegal logging pada tanaman kayu kehutanan. Perlu adanya peran serta aktor lain seperti masyarakat atau kelompok tertentu dalam penanganan lahan kritis sebagai mitra dari pemerintah. Selain illegal logging, pembukaan kawasan hutan yang ditanami tanaman perkebunan atau tanaman semusim juga dapat mengganggu stabilitas tata air sehingga dapat menyebabkan kerusakan lahan terutama yang terjadi pada Kabupaten Wonosobo, yaitu penanaman tanaman kentang.

Terbatasnya penguasaan teknologi juga dapat menjadi kendala dalam kegiatan RHL. Kurang menguasainya sistem teknologi dan informasi oleh aktor secara individu maupun kelompok dalam instansi sehingga dapat menghambat keberlangsungan program RHL yang dapat menyebabkan penanganan yang tidak tepat sasaran pada lahan kritis. Seperti pada halnya penguasaan pemetaan. Misalnya pada peta persebaran lahan kritis yang hanya dikuasai oleh beberapa individu saja sehingga kurang maksimal dalam program RHL. Selain itu, lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi RHL yang tidak terpantau dikhawatirkan dapat menjadikan kegiatan RHL menjadi salah sasaran pada lahan yang seharusnya tidak kritis.

Perlunya pemantauan dan evaluasi program RHL yang dilaksanakan oleh pemerintah mengingat terdapat beberapa kendala dan masalah. Maka sistem pemantauan dan evaluasi perlu memiliki tata kelola yang baik dan jelas. Dalam melihat tata kelola pemantauan dan evaluasi dapat

dilihat melalui Analisis Sistem Pemerintahan (ASK). Dale dkk memperkenalkan *Governance Systems Analysis (GSA)* atau yang kemudian disebut dengan Analisis Sistem Pemerintahan (ASK). Ia mengklaim sebagai kerangka kerja yang mengakar pada landasan teoritis yang lebih kuat untuk menganalisis sistem pemerintahan yang rumit dibandingkan dengan kerangka analisis kelembagaan umum lainnya. Kerangka ini juga dianggap memiliki konsep yang lebih menyeluruh karena dapat diterapkan pada berbagai tema, domain, dan level (Dale, Vella dan Potts, 2013).

Dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan suatu program, biasanya hanya dilihat dari hasil yang dicapai yang disesuaikan dengan target yang diharapkan oleh aktor/ instansi. Namun dalam studi ini, peneliti akan melihat dari sistem tata kelola pemantauan dan evaluasi dalam program RHL khususnya pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Dalam teori Analisis Sistem Pemerintahan (ASK) memiliki lima struktur dan fungsi untuk melihat tata kelola pemerintahan yang baik. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu struktur dan fungsi tersebut. Ke-lima struktur dan fungsi yang dituliskan dalam Analisis Sistem Pemerintahan (ASK) yaitu (i) penetapan visi dan tujuan, (ii) analisis, (iii) pengembangan strategi, (iv) implementasi, dan (v) pemantauan dan evaluasi.

Tata kelola pemerintahan yang dianalisis dalam studi ini hanya melihat pada pemantauan dan evaluasi karena dianggap dari hasil pemantauan dapat diketahui pengembangan strategi serta implementasi yang digunakan. Selain itu, dari hasil evaluasi dapat menjadi masukan dalam penetapan visi dan tujuan serta dapat menjadikan dasar dalam menganalisis. Pemantauan dan evaluasi merupakan hal yang saling berkaitan dan saling mendukung sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Program RHL merupakan program pemerintah pusat yang dapat diturunkan menjadi program pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota. Sehingga program RHL merupakan program multi level dari skala nasional hingga lokal. Program RHL juga dapat dikatakan program multi domain karena dapat melibatkan beberapa *stakeholder* terkait kehutanan, lingkungan, pertanian dan juga unsur masyarakat dalam pengelolaannya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti memiliki pertanyaan penelitian yaitu bagaimana kondisi sistem tata kelola pemantauan dan evaluasi pada program RHL di Kabupaten Wonosobo.

### **1.3. Tujuan dan Sasaran**

Berikut merupakan tujuan dan sasaran dari dilakukannya studi ini sehingga dapat menghasilkan studi yang bermanfaat dan tepat sasaran.

### **1.3.1. Tujuan**

Adapun tujuan dari adanya studi ini yaitu untuk mengetahui tata kelola pemantauan dan evaluasi terhadap program RHL di Kabupaten Wonosobo dengan pendekatan *Governance System Analysis (GSA)* atau yang kemudian disebut dengan Analisis Sistem Kepemerintahan (ASK).

### **1.3.2. Sasaran**

1. Identifikasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2. Analisis penerapan pengetahuan pemantauan dan evaluasi
3. Analisis hubungan/ konektivitas antar aktor maupun sistem dalam pemantauan dan evaluasi
4. Analisis kapasitas pengambilan keputusan yang dimiliki oleh stakeholder dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan RHL
5. Memberikan rekomendasi sistem tata kelola pemantauan dan evaluasi pada pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam penanganan program RHL

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian tentunya memiliki manfaat yang dapat diperoleh dari hasil studi. Manfaat dari studi ini terdiri dari beberapa manfaat yang terbagi, meliputi:

### **1.4.1. Manfaat Praktis**

Studi ini dapat bermanfaat secara langsung bagi tatanan praktis, terutama bagi penentu kebijakan di sektor kehutanan dan lahan, baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Beberapa aspek pada studi ini mungkin dapat dikatakan relevan untuk diterapkan pada wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Mengingat program Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan program nasional yang didesain diterapkan menjadi program provinsi dan kabupaten/ kota. Rekomendasi dari hasil studi ini dapat dijadikan petunjuk praktis dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Sehingga upaya investasi Rehabilitasi Hutan dan lahan dapat diarahkan secara tepat. Dalam waktu jangka panjang, diharapkan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat berkurangnya lahan kritis dan juga dapat menurunkan risiko terjadinya bencana alam.

### **1.4.2. Manfaat Teoritik**

Keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan tidak hanya terletak pada seberapa besar investasi yang dikeluarkan untuk program tersebut. Tetapi juga dilihat dari aspek

keperintahan atau tata kelola program. Studi ini merupakan diagnosis untuk mengetahui secara menyeluruh sistem pemerintahan sumberdaya alam. Sebagai kerangka ilmiah yang dapat diujikan secara universal, kerangka ini diuji cobakan pada aspek sumberdaya alam termasuk pada program rehabilitasi hutan dan lahan dan pada sistem pemerintahan termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, studi ini memiliki kontribusi dalam memperkaya penerapan kerangka analisis sistem pemerintahan (ASK) pada aspek sumberdaya alam.

## 1.5. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang menjadi bahasan penelitian berikut ini terbagi menjadi dua yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Pada ruang lingkup wilayah yaitu membatasi wilayah studi yang menjadi fokus dalam pembahasan. Ruang Lingkup Materi yang menjadi batasan-batasan dalam pembahasan penelitian ini.

### 1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang Lingkup wilayah dalam penelitian ini yaitu di Kabupaten Wonosobo yang memiliki luas wilayah sebesar 981.41 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Wonosobo terletak pada koordinat 7° 21'LU

109° 53'BT, memiliki 15 (lima belas) kecamatan yang masing-masing memiliki wilayah hutan yang cukup luas. 15 (lima belas) kecamatan tersebut terdiri dari kecamatan Garung, Kalibawang, Kalikajar, Kaliwajar, Kaliwiro, Keajar, Kepil, Kertek, Leksono, Mojotengah, Sapuran, Selomerto, Sukoharjo, Wadaslintang, Watumalang, Wonosobo.

**Gambar 1.1** merupakan peta batas administratif Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo memiliki batas wilayah sebelah utara yaitu Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang, sebelah selatan dengan Kabupaten Purworejo dan sebelah barat yaitu Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara.

### 1.5.2. Ruang Lingkup Materi

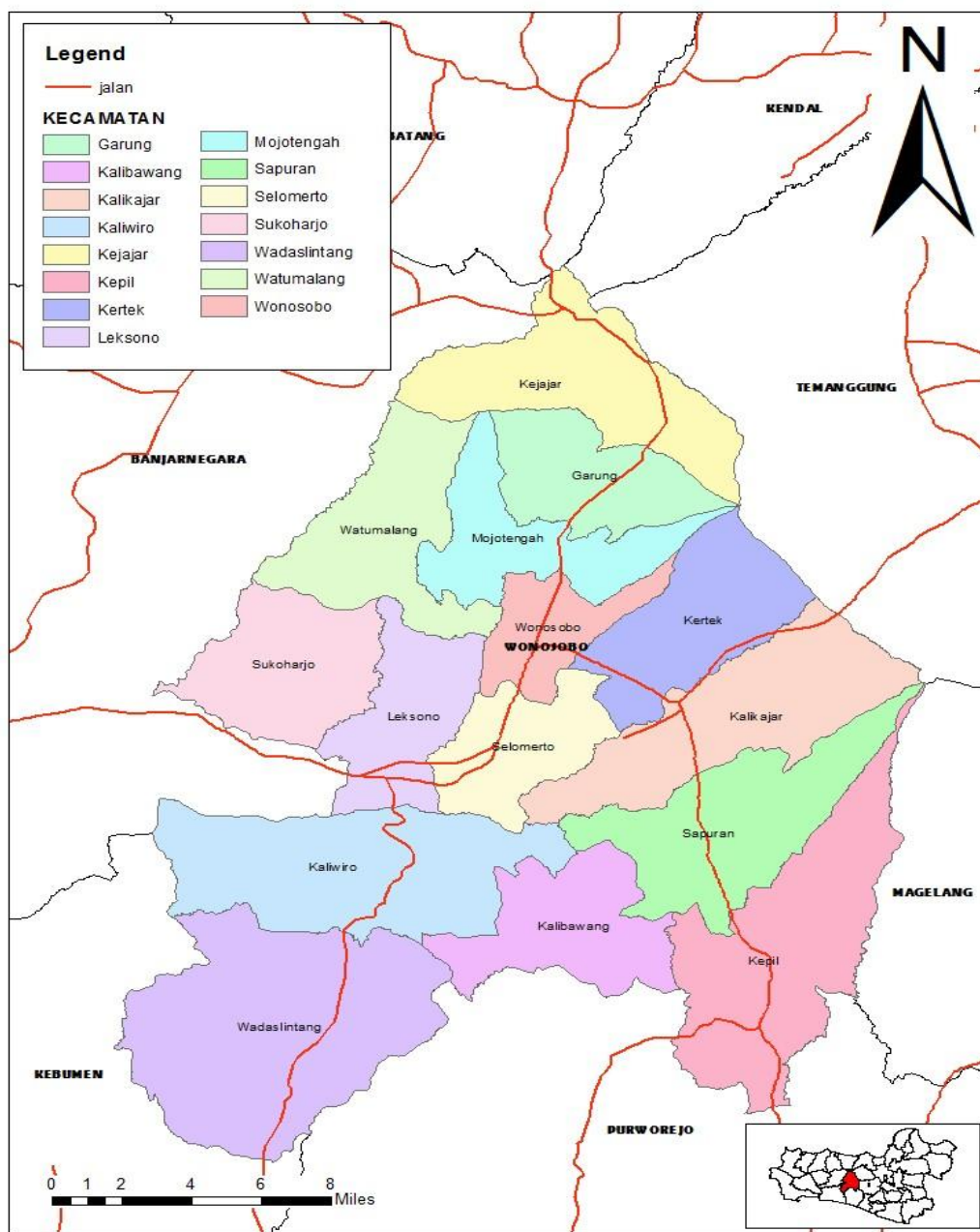
Ruang lingkup materi pada studi ini yaitu berawal dari tingkat lahan kritis di Kabupaten Wonosobo yang cukup besar, yang kemudian harus mendukung target pengurangan lahan kritis dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 30%. Maka dari itu diperlukan analisis yang dapat melihat sistem tata kelola sebuah lembaga, dalam hal ini menggunakan pendekatan Analisis Sistem Pemerintahan (ASK) yang dapat ditinjau dari visi dan penetapan tujuan, analisis (sistem penelitian dan kajian), pengembangan strategi, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi untuk dapat memberikan hasil rekomendasi ataupun masukan bagi

regulasi maupun pemerintah pada program yang berkaitan dengan pengurangan lahan kritis. Studi ini merupakan bagian dari kerjasama penelitian antara dosen dan mahasiswa, mengenai penerapan Analisis Sistem Kepemerintahan (ASK) di Kabupaten Wonosobo melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Ruang lingkup dalam studi ini, mahasiswa hanya melihat salah satu bagian dari struktur ASK yaitu mengenai pemantauan dan evaluasi, yang dipandang bahwa identifikasi aspek pemantauan dan evaluasi dapat menjawab pertanyaan penelitian serta dapat melihat keberlanjutan program RHL agar sesuai dengan target yang ditetapkan baik di tingkat nasional/ provinsi maupun kabupaten/ kota.

**Gambar 1.2** merupakan diagram kerangka pemikiran yang merupakan bagian dari alur ruang lingkup materi dalam studi ini. Kerangka pikir disusun berdasarkan pada representasi alur pemikiran mengenai latar belakang dari penelitian hingga analisis yang akan digunakan serta keluaran yang akan dihasilkan dalam penelitian mengenai “Tata Kelola Pemantauan dan Evaluasi Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kabupaten Wonosobo”.

## 1.6. Metode Penelitian

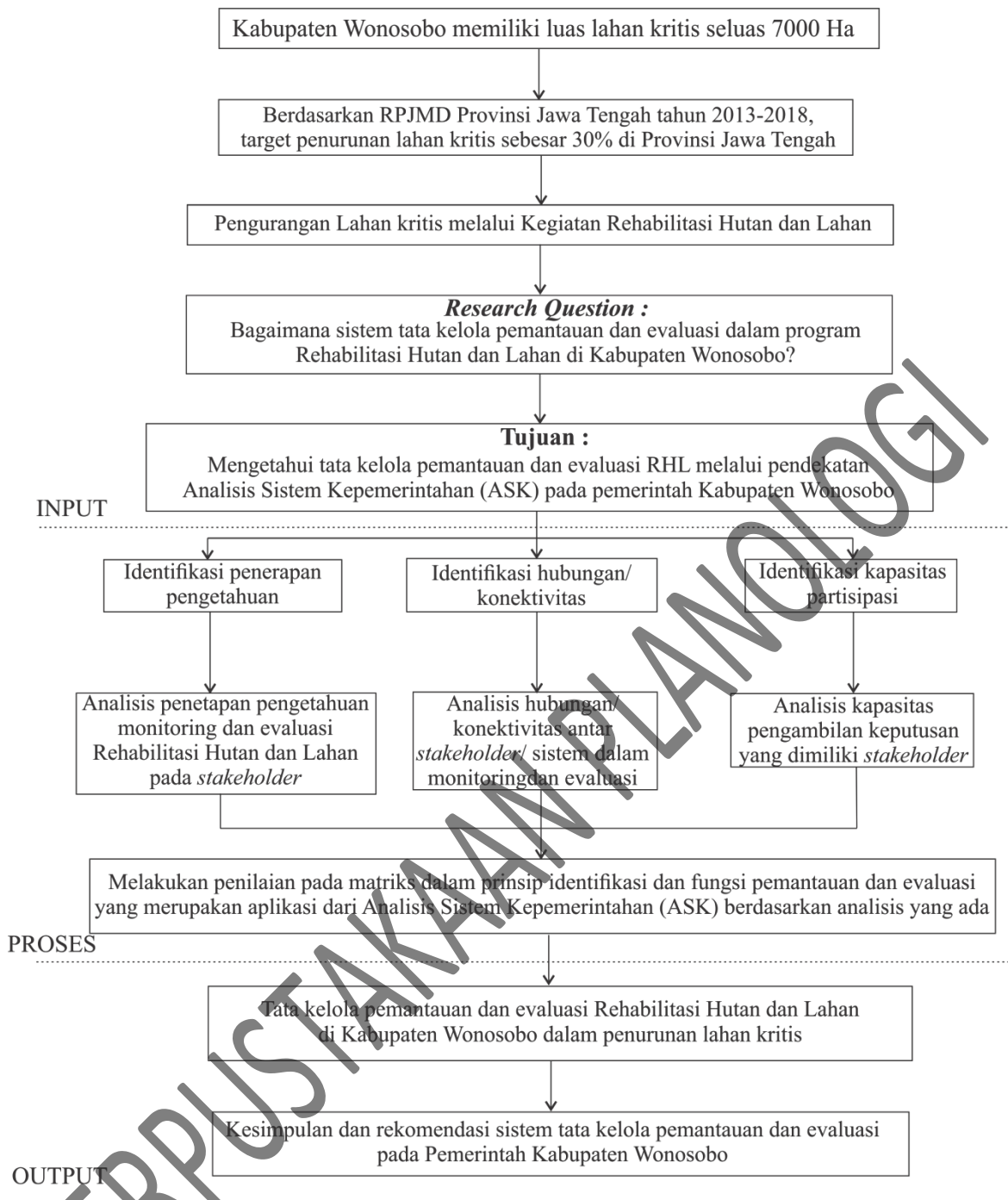
Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dapat digunakan untuk memperoleh data yang bersifat fakta dan faktual dengan tujuan agar dapat dengan mudah dikembangkan ditemukan serta dibuktikan. Metode penelitian merupakan pengetahuan yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Penelitian merupakan langkah sistematis dalam upaya pemecahan masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan yang lebih bersifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan yang berusaha memahami, menafsirkan, makna dari suatu peristiwa interaksi dalam situasi tertentu melalui perspektif peneliti sendiri. Metode kualitatif juga sering digambarkan dengan kata-kata dalam mengeksplorasi dan memahami para partisipan (Creswell, 2012). Metode kualitatif yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan *Analisis Sistem Kepemerintahan (ASK)*. Peneliti akan meneliti hasil dari Analisis yang digunakan dan mendeskripsikan dalam bentuk deskripsi sehingga dapat memudahkan dalam pengolahan dalam studi ini. Selain itu, tema yang digunakan dalam pendekatan ini juga cenderung lebih cocok jika menggunakan metode kualitatif karena dapat menggali informasi dari *stakeholders* terkait mengenai program RHL. Dapat menjawab pertanyaan penelitian berupa bagaimana sistem tata kelola pemantauan dan evaluasi program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang ada di Kabupaten Wonosobo.



Sumber : Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2011

**Gambar 1.1**  
**Peta Batas Administrasi Kabupaten Wonosobo**

PERM



Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2018

**Gambar 1.2**  
**Kerangka Pikir**

### 1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data pada studi ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Tujuan dari pengumpulan data ini yaitu untuk mendapatkan data atau informasi yang faktual dan aktual sesuai dengan kondisi pada wilayah studi.

#### a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung berdasarkan responden yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan dilakukannya pengumpulan data primer dikarenakan dalam analisis menggunakan analisis kualitatif dimana dibutuhkan partisipan dalam proses pengerjaan penelitian. Teknik dalam pengumpulan data primer, berupa wawancara. Menurut Bungin, (2007). Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian secara bertatap muka dengan informan maupun tidak secara langsung dapat juga dilakukan melalui telepon dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dalam metode kualitatif memerlukan pertanyaan yang lebih umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan. Biasanya partisipan memiliki jawaban yang tidak dapat diarahkan, bersifat umum dan tidak menunjukkan kesimpulan. Pada saat pelaksanaan interview dengan partisipan, peneliti tidak dapat memberikan intervensi lebih terhadap partisipan sehingga jawaban dari penelitian kualitatif akan secara umum dan mendalam yang didapatkan dari partisipan. Wawancara yang digunakan yaitu semi terstruktur, dimana pertanyaan untuk narasumber bersifat terbuka, namun masih dibatasi oleh tema penelitian. Narasumber pada penelitian ini yaitu kepala instansi atau bidang yang mewakili yang berhubungan dengan program RHL. **Tabel I.1** merupakan data informasi daftar informan yang diwawancarai.

**TABEL I.1**  
**PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERLIBAT**

Level	Pemangku Kepentingan ( <i>stakeholders</i> )	Alasan Pemilihan
Level Nasional	<b>Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK):</b> BPDAS Serayu Opak Progo	UPT KLHK yaitu BPDAS memiliki tupoksi yaitu sebagai penyusun rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, kemudian sebagai pelaksana rehabilitasi hutan dan lahan daerah aliran sungai dan hutan lindung pada SWP DAS Serayu, opak dan progo. Serta tugas lain yang berkaitan dengan DAS dan kawasan Hutan Lindung
Level Regional/ Provinsi	<b>Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :</b> Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (DLHK)	Instansi ini memiliki lingkup kerja pada perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan hutan. Serta memiliki bidang yang dapat berperan dalam

Level	Pemangku Kepentingan ( <i>stakeholders</i> )	Alasan Pemilihan
		pembinaan dan pengawasan pengelolaan kawasan hutan dan rehabilitasi hutan.
	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Instansi ini memiliki lingkup kerja dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana produksi, prasarana, pengolahan lahan, air dan konservasi.
Level Kota/ Kabupaten	<b>Pemerintah Kabupaten Wonosobo:</b> Balai Pengelolaan Hutan Wilayah VIII	Instansi ini memiliki lingkup kerja dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang urusan kehutanan. Instansi ini juga merupakan instansi UPT DLHK Provinsi Jawa Tengah yang memiliki wilayah kerja meliputi Kab. Wonosobo, Temanggung, Magelang dan Purworejo.
	Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo	Instansi ini memiliki lingkup kerja dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana produksi, prasarana, pengolahan lahan, air dan konservasi.
	Penyuluh Kehutanan	Memiliki peran dan fungsi sebagai penyuluh serta pemantauan dan evaluasi terhadap program RHL pada level kecamatan. Selain itu juga sebagai penghubung antara kelompok dan instansi pemerintahan.
Komunitas	<b>Kelompok Tani</b>	Komunitas ini memiliki fungsi menjaga kelestarian hutan yang ada di sekitar tempat tinggal (desa) mereka agar tidak terdegradasi dan juga sebagai aktor dalam pelaksanaan program yang diberikan oleh instansi di atasnya.

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2018

Penelitian ini menggunakan sistem *key person* dalam menentukan informan yang akan dijadikan narasumber dalam interview. Melalui metode *key person* maka peneliti dapat menentukan instansi yang berkaitan langsung atau memiliki tanggung jawab dan kewenangan terhadap program Rehabilitasi Hutan dan Lahan ini. Pelibatan *stakeholder* meliputi beberapa pemangku kepentingan yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten. Berikut ini akan dijelaskan mengenai *stakeholder* yang akan menjadi narasumber/ informan dalam studi ini. Namun daftar narasumber tersebut dapat berubah secara kondisional melihat situasi dan kondisi pada saat melakukan survei penelitian. *Stakeholder* berikut ini merupakan beberapa instansi pemerintah, swasta maupun sektor masyarakat yang memiliki peran dalam sumberdaya alam, lingkungan dan khususnya pada sektor kehutanan dan perkebunan yang menangani lahan kritis baik di Provinsi Jawa Tengah maupun di Kabupaten Wonosobo.

## **b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data awal yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi yang ada sekarang untuk dijabarkan sebelum dilakukannya analisis. Teknik ini biasanya digunakan sebagai identifikasi awal dalam memperkuat justifikasi pemilihan lokasi, sebagai basis data dalam analisis serta dapat digunakan sebagai pendukung gambaran umum dalam analisis program. Pengumpulan data sekunder berupa dokumen-dokumen, kebijakan, serta regulasi yang ada pada instansi pemerintah baik skala nasional maupun skala lokal. Dalam pengumpulan data sekunder, kemudian dokumen ditelaah dan dirumuskan sebagai dasar yang mendukung kegiatan penelitian mengenai pemantauan dan evaluasi program RHL. Sementara itu dalam domain manajemen DAS, memiliki rencana hirarkis dari level zonasi DAS, provinsi hingga kabupaten yang masing-masing memiliki fungsi dan dapat ditelaah melalui data sekunder.

### **1.6.2. Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Tentunya dalam penelitian, kebutuhan data sangat diperlukan untuk menyusun informasi pendukung dalam menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Kebutuhan data digunakan sebagai garis besar data yang akan dicari dan data yang dibutuhkan sehingga memudahkan peneliti dalam mencari data dan juga digunakan untuk peneliti dalam kesesuaian data dalam studi ini. **Tabel I.2** merupakan tabel kebutuhan data yang digunakan dalam menganalisis penelitian.

### **1.6.3. Teknik Analisis Data**

Analisis dalam penelitian kualitatif yaitu megorganisasikan data yang telah diperoleh dan siap untuk dilakukan analisis secara kualitatif. Pada teknik analisis data kualitatif terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para peneliti yaitu (1) Pengumpulan data hasil perolehan dari lapangan, (2) menuliskan transkrip dari rekaman, (3) membaca ulang transkrip agar mudah dipahami, (4) pemberian koding, (5) identifikasi konteks dan tema, (6) penyajian data dalam bentuk bagan, matriks, tabel dan pembahasan, (7) uji validitas data, (8) penulisan laporan mendeskripsikan bagan, matriks, tabel serta pembahasan. Pada teknik analisis data kualitatif ini peneliti akan menjabarkan tahapan analisis tersebut (Bungin, 2007; Creswell, 2014)

Teknik analisis yang digunakan yaitu dari telaah dokumen kemudian dilakukan komparasi data. Hasil dari interview lapangan dilakukan penyesuaiaan data dan komparasi dengan melakukan penulisan transkrip dari hasil wawancara. Teknis penulisan transkrip yaitu, peneliti menuliskan secara rapih dan runtut perolehan data lapangan yang didapatkan melalui teknik wawancara. Setelah mengelompokkan ke berbagai tema, maka didapatkan data yang dapat

dijadikan bahan dalam penyajian data. Tema sering disebut juga suatu informasi yang luas yang terdiri dari beberapa kode yang dikelompokkan untuk membentuk ide umum. Peneliti menggunakan tiga tema besar yang nantinya akan dipisahkan lagi dengan adanya sub-sub tema dalam penelitian. Tema yang ditentukan oleh peneliti yaitu penerapan pengetahuan, konektivitas dan kapasitas partisipan yang dapat dilihat pada **Tabel I.3**.

**TABEL I. 2**  
**FORM KATEGORI TEMA**

Tema	Sub tema	Uraian Hasil Wawancara
Aplikasi/ penerapan Pengetahuan (P)	Hasil (P1) Hasil pemantauan dan evaluasi (P2)	
Konektivitas (K)	Mekanisme penetapan tujuan (K1) Mekanisme pemantauan dan evaluasi (K2) Pengaruh pemantauan dan evaluasi (K3)	
Kapasitas Partisipan (CP)	Kesediaan kapasitas pemantauan (CP1) Ketersediaan pemantauan secara menyeluruh dan terpadu (CP2) Kapasitas evaluasi (CP3) Peningkatan akuntabilitas (CP4)	

*Sumber : Analisis hasil peneliti, 2018*

Tujuan dalam penulisan transkrip untuk memudahkan peneliti dalam menelaah hasil wawancara. Selain itu, rekapitulasi data juga Setelah penulisan transkrip dan setelah data yang diperoleh dari lapangan dapat direduksi. Artinya, dapat disederhanakan atau dapat disaring sehingga dapat memudahkan peneliti. Langkah selanjutnya yaitu proses pengkodean (koding). Pengkodean dimulai dengan mengelompokkan teks yang diperoleh dari transkrip menjadi kategori informasi yang lebih sempit, mencari bukti untuk kode tersebut dan kemudian pemberian label sebagai kode. Peneliti akan mengurutkan hasil wawancara mulai dari urutan narasumber berdasarkan instansi yang dijadikan informan. Agar memudahkan dalam pemberian kode, pada **Tabel I.4** merupakan contoh koding yang digunakan oleh peneliti. Pada keterangan sub tema dapat dilihat huruf yang ada pada keterangan **Tabel I.3**. Pada kode informan dapat diisikan berdasarkan kode dari hasil wawancara yang tertera pada transkrip. Baris, merupakan informasi baris keberapa pada kata kunci yang akan dijadikan landasan dalam menganalisis.

**TABEL I.3**  
**TABEL DATA PENELITIAN**

NO	SASARAN	KEBUTUHAN DATA	JENIS DATA	BENTUK DATA	TAHUN	SUMBER	ANALISIS	MANFAAT
1.	Identifikasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen konvensi internasional tentang konservasi hutan, lahan, pertanian, sumberdaya air, pengurangan risiko bencana, dan perubahan iklim.</li> <li>2. Undang-undang pokok agrarian, UU Kehutanan, UU lingkungan hidup, UU pengelolaan sumberdaya air, UU pertanian.</li> <li>3. Rencana Strategis BPDAS, BKSDA.</li> <li>4. Juklak dan Juknis Pelaksanaan program RHL.</li> <li>5. Juknis sistem alih fungsi kawasan hutan, Juknis pengelolaan dan tata hutan.</li> <li>6. RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018</li> <li>7. RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029</li> <li>8. Renstra Dinas.</li> </ol>	Sekunder	Data tertulis	Terbaru dan yang masih berlaku	Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah BAPPEDA Kab. Wonosobo	Analisis Program RHL di Kabupaten Wonosobo	Dapat mengetahui pengertian RHL melalui dokumen-dokumen yang telah disepakati. Dapat melihat target pencapaian setiap tahunnya, dapat melihat arahan kebijakan bagi pelaksana program, sebagai dasar acuan dalam melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Serta pentingnya kegiatan RHL bagi keberlanjutan lingkungan.

NO	SASARAN	KEBUTUHAN DATA	JENIS DATA	BENTUK DATA	TAHUN	SUMBER	ANALISIS	MANFAAT
		<p>Lingkungan hidup dan kehutanan Jawa Tengah, dinas pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan, BPPD.</p> <p>9. Prosedur perijinan pembangunan pemerintah provinsi.</p> <p>10. Perda RPJMD Kabupaten Wonosobo</p> <p>11. RTRW Kabupaten Wonosobo</p> <p>12. Renstra kehutanan, pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan, BPPD Kabupaten Wonosobo</p>						
2.	Identifikasi penerapan pengetahuan pemantauan dan evaluasi pada aktor yang terlibat	<p>1. Pengetahuan mengenai pemantauan program</p> <p>2. Keluaran program yang diharapkan</p> <p>3. Sistem pemantauan dan evaluasi dalam jangka panjang</p>	Primer (wawancara)	Deskriptif	Tahun 2018	BPDAS SOP DLHK Jateng Dinpartan Jateng KPH Kedu Utara DLHK Wonosobo Dinpartan Wonosobo BPH Wilayah VIII Penyuluh Kehutanan Kelompok Tani Kec. Kejar	Analisis Deskriptif	Untuk melihat hasil dari pemantauan dan evaluasi serta perencanaan yang akan datang.
3.	Analisis hubungan/konektivitas antar	1. Mekanisme integrasi dalam penetapan visi	Primer (Wawancara)	Deskriptif	Tahun 2018	BPDAS SOP DLHK Jateng	Analisis Deskriptif	Untuk mengetahui seberapa besar

NO	SASARAN	KEBUTUHAN DATA	JENIS DATA	BENTUK DATA	TAHUN	SUMBER	ANALISIS	MANFAAT
	aktor maupun sistem dalam pemantauan dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>dan tujuan</li> <li>2. Mekanisme evaluasi yang dilakukan untuk peninjauan kembali</li> <li>3. Bentuk sistem pemantauan dan pelaporan strategis dalam RHL</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinpartan Jateng</li> <li>KPH Kedu Utara</li> <li>DLHK Wonosobo</li> <li>Dinpartan Wonosobo</li> <li>BPH Wilayah VIII</li> <li>Penyuluh Kehutanan</li> <li>Kelompok Tani</li> <li>Kec. Kejar</li> </ul>		hubungan/ konektivitas antar stakeholder dalam program RHL
4.	Analisis kapasitas pengambilan keputusan yang dimiliki oleh stakeholder dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan RHL.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kapasitas pemantauan dan evaluasi</li> <li>2. Bentuk pemantauan dan evaluasi secara individu atau kolektif</li> <li>3. Kapasitas evaluasi dan pelaporan yang jelas dalam menunjang akuntabilitas program</li> </ul>	Primer (Wawancara)	Deskriptif	Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>BPDAS SOP</li> <li>DLHK Jateng</li> <li>Dinpartan Jateng</li> <li>KPH Kedu Utara</li> <li>DLHK Wonosobo</li> <li>Dinpartan Wonosobo</li> <li>BPH Wilayah VIII</li> <li>Penyuluh Kehutanan</li> <li>Kelompok Tani</li> <li>Kec. Kejar</li> </ul>	Analisis Deskriptif	Untuk mengetahui seberapa besar upaya kabupaten Wonosobo dalam mendukung pengurangan lahan kritis serta untuk melihat kapasitas stakeholder terkait dalam penanganan program RHL di Kabupaten Wonosobo
5.	Memberikan rekomendasi sistem tata kelola pemantauan dan evaluasi pada pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam penanganan program RHL	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi bagi keberlanjutan sistem tata kelola pemerintahan di Kabupaten Wonosobo</li> <li>2. Upaya kedepan dalam kontribusinya ke jawa tengah</li> </ul>	Sekunder (olah data dari hasil wawancara)	Deskriptif	Tahun 2018	Hasil analisis matriks hubungan yang dilakukan pada sasaran keempat	Analisis Deskriptif	Untuk memberikan rekomendasi mengenai sistem tata kelola pemerintahan yang ada di Kabupaten Wonosobo mengenai program RHL

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2018

**TABEL I. 4**  
**FORMAT KODING HASIL WAWANCARA**

<b>Sub tema / Kode Informan / Baris</b>
---

*Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2018*

Kemudian langkah selanjutnya yaitu uji validitas data. Uji validitas data dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Beberapa strategi validitas yang dapat digunakan dalam metode kualitatif diantaranya, triangulasi data, (*member checking*) informan mengecek seluruh proses analisis data, waktu yang lama dan observasi berulang pada lokasi penelitian, (*peer examination*) pemeriksaan oleh sesama peneliti, pola partisipatoris dan klarifikasi bias peneliti (Creswell, 2012). Penelitian ini menggunakan uji validitas berupa triangulasi data. Triangulasi data merupakan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi data meliputi dua hal yang peneliti gunakan, yaitu triangulasi metode dan triangulasi sumber data, berikut merupakan penjelasannya.

Triangulasi metode, dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kebenaran, peneliti dapat menggunakan metode penelitian berupa wawancara, observasi dan survei untuk mendapatkan data maupun kebenaran sebuah informasi. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan perbedaan metode dengan menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran tersebut. Triangulasi ini dilakukan ketika data yang diperoleh merasa diragukan kebenarannya. Triangulasi tidak perlu dilakukan apabila data yang diperoleh sudah jelas atau data tersebut berupa teks maupun naskah tertulis, sehingga tidak perlu melakukan uji validitas dengan triangulasi metode.

Triangulasi sumber data, merupakan penggalian kebenaran informasi tertentu melalui sumber perolehan data. Misalnya, selain wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, catatan pribadi maupun foto yang dapat memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti yang dapat melahirkan kebenaran maupun kepastian. Triangulasi sumber data juga memberikan kesempatan untuk dilakukannya hal-hal sebagai berikut, (1) penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, (2) mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, (3) menyediakan tambahan informasi secara sukarela, (4) memasukkan informan kedalam penelitian, (5) menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan (Bungin, 2007; Rahardjo, 2010). Konsep validitas dalam penelitian kualitatif biasanya sudah dipermudah pada saat penelitian berlangsung, secara tidak langsung peneliti sudah melakukan uji validitas dalam penelitiannya karena validitas ini dapat dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya penelitian.

## 1.7. Kerangka Analisis

Pada studi mengenai “Kesiapan pemerintah kabupaten/ kota dalam penurunan lahan kritis” menggunakan empat analisis yang digunakan dalam penyelesaian studi ini, berikut merupakan empat analisis yang digunakan,

### 1) Identifikasi program rehabilitasi hutan dan lahan

Hal ini dilakukan sebagai pengantar dalam dilakukannya studi ini. Identifikasi ini memiliki tujuan sebagai kontekstualisasi sistem sehingga perlu diketahui rancangan program RHL dari skala nasional, hingga implementasinya pada skala regional dan skala lokal. Selain itu juga dapat ditinjau melalui sub-domain yang terkait melalui program RHL di Kabupaten Wonosobo. Identifikasi dilakukan melalui teknik analisis review literature, dokumen dan juga komparasi kesesuaian antara dokumen dengan kondisi fakta yang ada di lapangan.

### 2) Identifikasi penerapan pengetahuan pemantauan dan evaluasi pada aktor yang terlibat

Analisis ini, dilakukan untuk mengetahui penerapan analisis strategis mulai dari sistem pemantauan, penelitian, pengkajian, dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan dalam jangka panjang hingga saat ini. Selain itu analisis ini juga dapat digunakan dalam hal menyebar luaskan informasi di seluruh partisipan dan sistem yang terlibat sehingga seluruh aktor dapat mengetahui perkembangannya serta dapat mendukung keputusan sistem. Teknik analisis dilakukan dengan melihat komparasi hasil wawancara dengan identifikasi data yang telah dilakukan sebelumnya.

### 3) Analisis hubungan/ konektivitas antar aktor maupun sistem dalam pemantauan dan evaluasi

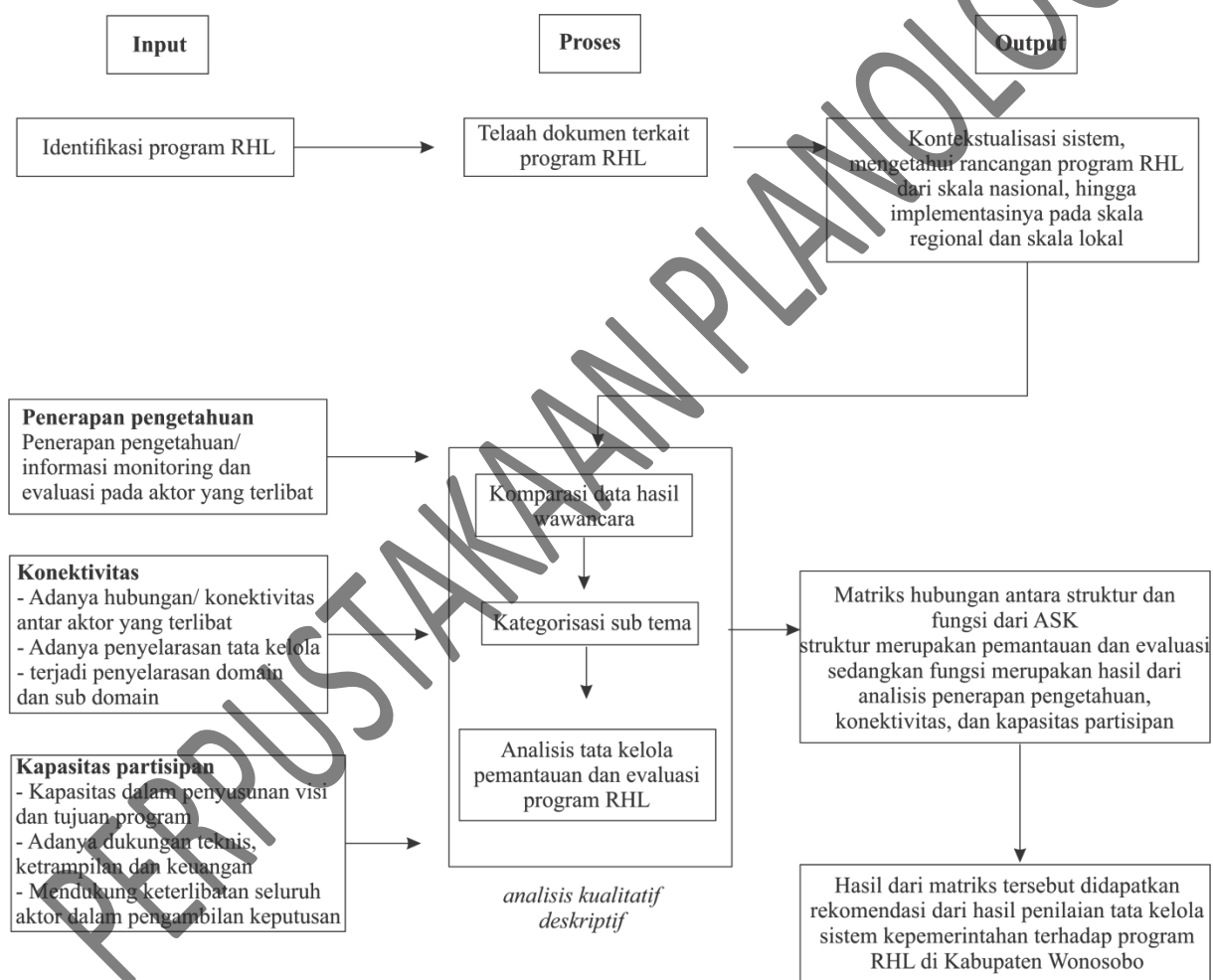
Analisis ini digunakan untuk mengetahui adanya hubungan/ konektivitas antar *stakeholder* dalam program RHL yang merupakan program bersama yang melibatkan *stakeholder* dari berbagai kalangan mulai dari sistem pemerintahan, LSM hingga masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan maupun non hutan yang memiliki lahan kritis maupun memiliki potensi kritis. Terjadinya penyesuaian antar skala spasial dan waktu serta terjadinya penyesuaian antara tata kelola dengan tema tata kelola, domain dan sub-domain.

### 4) Analisis kapasitas pengambilan keputusan yang dimiliki oleh stakeholder dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan RHL

Analisis kapasitas pengambilan keputusan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar upaya kabupaten Wonosobo dalam mendukung pengurangan lahan kritis serta untuk melihat kapasitas aktor terkait dalam penanganan program RHL di Kabupaten Wonosobo. Analisis kapasitas ini dapat digunakan untuk melihat sistem tata kelola pemerintahan yang ada di Kabupaten Wonosobo dilihat dari kapasitas dalam penyusunan visi dan tujuan program hingga hasil dari pemantauan dan evaluasi. Serta untuk mengetahui dukungan teknis, ketrampilan dan dukungan keuangan untuk keterlibatan semua aktor dalam sebuah sistem.

- 5) Memberikan rekomendasi bagi sistem tata kelola pemantauan dan evaluasi pada program RHL di Kabupaten Wonosobo

Skema keluaran dari masing-masing analisis yang sudah dilakukan berupa matriks hubungan struktur dan fungsi dari pemantauan dan evaluasi. Matriks tersebut dilakukan untuk memberikan rekomendasi dari hasil penilaian tata kelola sistem pemerintahan terhadap program RHL di Kabupaten Wonosobo. Matriks tersebut dapat diolah dan dideskripsikan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada sistem tata kelola evaluasi dan pemantauan program RHL kemudian dapat dijadikan rekomendasi pada sistem. Dapat dilihat pada gambar, kerangka analisis pada **Gambar 1.3**.



Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2018

**Gambar 1.3**  
**Kerangka Analisis**

## **1.8. Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi pada studi ini. Serta kerangka analisis dan metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini dan kerangka analisis yang digunakan sebagai acuan dalam proses analisis.

### **BAB II Kajian Pustaka**

Pada bab kajian pustaka membahas mengenai beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penentuan landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Bab ini berisi mengenai pengertian deforestasi, konservasi hutan, sistem kelembagaan, Analisis Sistem Pemerintahan, sistem pemantauan dan evaluasi, serta sintesa literatur yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemilihan indikator tata kelola pemantauan dan evaluasi program RHL di Kabupaten Wonosobo.

### **BAB III Gambaran Umum Wilayah**

Menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah studi yang akan dijadikan sebagai lokasi studi, kondisi sosial ekonomi, serta gambaran program RHL yang ada di skala nasional, provinsi dan Kabupaten Wonosobo secara umum.

### **BAB IV Analisis Tata Kelola Pemantauan dan Evaluasi Program RHL**

Berisi mengenai analisis yang dapat dijadikan sebagai pokok bahasan dari dilakukannya penelitian ini serta dapat menjawab sasaran dari adanya penelitian ini.

### **BAB V Penutup**

Berisi mengenai kesimpulan dan rekomendasi mengenai hasil dari penelitian ini. Kesimpulan berisi mengenai ringkasan hasil penelitian. Rekomendasi yang diberikan berupa rekomendasi untuk pemerintah dan juga rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.